

HARIAN

EDISI SENIN, 01 JULI 2024

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

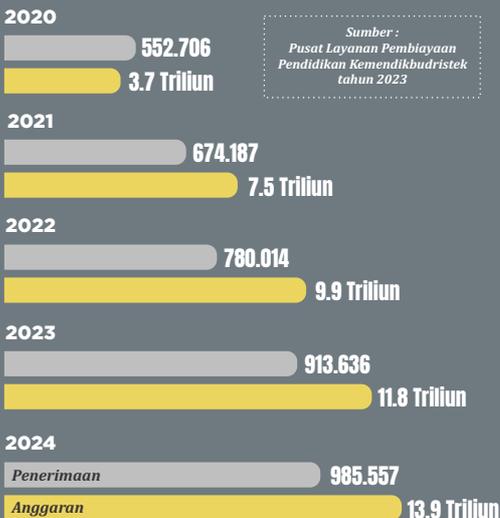
[f lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)



# IMBAS PDN DIRETAS DATA MAHASISWA KIP 'AMBLAS'

## ANGGARAN DAN PENERIMA KIP KULIAH TERUS MENINGKAT SIGNIFIKAN SETIAP TAHUN



**M**ahasiswa dari keluarga tidak mampu ikut merasakan getirnya imbas gangguan Pusat Data Nasional (PDN) karena diserang ransomware. Sebanyak 853.393 data calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) 2024 dikabarkan ikut 'amblas' alias hilang. Kementerian Pendidikan menginstruksikan perguruan tinggi memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar KIP yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) tahun ini. Tak hanya itu, kebobolan data ini juga berdampak pada 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah 'ongoing'. Selama proses pemulihan, pengajuan dan pencairan akan dilakukan secara manual. Sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada tanggal 29 Juli 2024. Ironis, di dunia pendidikan dan kebudayaan saja total terlacak 47 domain layanan atau aplikasi yang terdampak.

**Government (Hal.2)  
Juli Dipastikan  
Tarif Listrik Tak Naik,  
Tetap Sejak 2022**

Baca di hal 11....

# Juli Dipastikan Tarif Listrik Tak Naik, Tetap Sejak 2022

## RINCIAN TARIF LISTRIK DAN 'PERKIRAAN TAGIHAN REKENING BULANAN:

### 1. Pelanggan R2 (3.500 VA-5.500 VA)

- Rp 1.444,70 per kWh jadi Rp 1.699,53 per kWh (naik 17,64 persen)

- Perkiraan tagihan rekening dari Rp 632.568 per bulan jadi Rp 744.146 per bulan (naik Rp 111.578)

### 2. Pelanggan R3 (6.600 VA-ke atas)

- Rp 1.444,70 per kWh jadi Rp 1.699,53 per kWh (naik 17,64 persen)

- Perkiraan tagihan rekening dari Rp 1.96.764 per bulan jadi Rp 2.308.975 per bulan (naik Rp 346.211)

### 3. Pelanggan P1 (6.600 VA-200 KVA)

- Rp 1.444,70 per kWh jadi Rp 1.699,53 per kWh (naik 17,64 persen)

- Perkiraan tagihan rekening dari Rp 5.548.587 per bulan jadi Rp 6.527.300 per bulan (naik Rp 978.713)

### 4. Pelanggan P2 (lebih dari 200 KVA)

- Rp 1.144,70 per kWh jadi Rp 1.522,88 per kWh (naik 36,61 persen)

- Perkiraan tagihan rekening dari Rp 105.251.885 per bulan jadi Rp 143.787.781 per bulan (naik Rp 38.535.896)

### 5. Pelanggan P3 (TR)

- Rp 1.444,70 per kWh jadi Rp 1.699,53 per kWh (naik 17,64 persen)

- Perkiraan tagihan rekening dari Rp 1.536.000 per bulan jadi Rp 1.806.934 per bulan (naik Rp 270.934)



(Ilustrasi) Menurut aturan penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan. Dok.ant

**JAKARTA**-Pemerintah memastikan tidak menaikkan tarif dasar listrik di kuartal III 2024 atau Juli ini. Tercatat, tarif listrik baik untuk pelanggan golongan subsidi maupun nonsubsidi tak berubah sejak 2022.

Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Berdasarkan acuan 4 parameter tersebut, saat ini pemerintah dimungkinkan mengambil pilihan untuk menaikkan tarif listrik.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menurkan pemerintah ternyata memilih untuk menjaga laju inflasi tidak melonjak dan tidak menimbulkan gejala menjelang transisi pemerintahan.

"Tentu ada pertimbangan khusus. Nampaknya saat ini pemerintah merasa lebih penting untuk mengendalikan inflasi, menghindari gejala sosial dan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menunda kenaikan tarif listrik," ujar Ali, Minggu (30/6/2024).

Adapun parameter ekonomi makro yang digunakan pemerintah untuk memutuskan tarif listrik kuartal III tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Februari, Maret, dan April Tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp 15.822,65 per dolar AS.

Kemudian, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 83,83 per barel, inflasi sebesar 0,38

persen, dan HBA sebesar USD 70 per ton sesuai kebijakan DMO Batu bara.

Ali menilai, kebijakan ini sebenarnya tidak akan berdampak besar bagi PT PLN (Persero) secara finansial, karena pemerintah yang harus menanggung biaya subsidi atau membayar dana kompensasi.

"Justru citra PLN sejena menjadi bagus di masyarakat karena tidak ada kenaikan tarif listrik," tutur Ali.

Meski demikian, Ali menyebut jika pemerintah malah menunda-nunda pembayaran subsidi dan kompensasi untuk menombok selisih harga jual listrik dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN, maka hal itu menjadi bom waktu bagi perusahaan.

"Kebijakan itu akan menjadi bom waktu dan boomerang bagi PLN jika ternyata pemerintah tidak konsisten dan lalai dalam pembayaran biaya subsidi atau dana kompensasi kepada PLN yang telah berinvestasi besar dalam penyediaan listrik," ujar Ali.

Ali menilai bagi pemerintah, kebijakan tidak menaikkan tarif listrik ini merupakan sebuah pertarungan. Pasalnya, kenaikan biaya subsidi atau dana kompensasi pasti akan berdampak pada APBN dan bisa jadi membebani keuangan negara.

"Apalagi dalam kondisi saat ini di mana penerimaan negara sedang menurun sedangkan beban operasional pemerintah justru meningkat, pemerintah harus berpikir dan bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lain untuk menutup APBN," tutur Ali.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, mengatakan kondisi keuangan PLN tidak baik-baik

saja, karena berdasarkan laporan audited, beban usaha PLN naik 13 persen di 2023. Sedangkan pendapatan naik 10 persen karena selisih kurs.

"Saat ini kurs sudah berubah secara drastis, hal ini akan membalik seperti kondisi tahun 2023 di mana PLN terbebani Rp 19 triliun, karena selisih kurs," ujar Yayan.

### Alasan Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik pada kuartal ketiga tahun ini. "Kalau listrik, nggak naik," ujar Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu sebelumnya menyebutkan kebijakan itu adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri, serta menjaga tingkat inflasi.

Dilansir dari Antara, dalam hitungan pemerintah, seharusnya ada kenaikan tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan bila dibandingkan kuartal sebelumnya jika mendasarkan empat parameter. Empat parameter itu adalah kurs, ICP, inflasi dan HBA.

Jisman mengatakan bahwa tarif listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik. "Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga tidak mampu, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM," ucap Jisman. (wid,rls, ant,tmp/dya)

# PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

**JAKARTA** - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharap segera menyerahkan daftar nama anggota legislatif terlibat judi online. Langkah ini agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa segera menindak.

"PPATK seharusnya segera melaporkan nama-nama yang diduga bermasalah itu ke MKD DPR RI, sehingga MKD dapat segera menindaklanjuti," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Hidayat yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi PKS menyampaikan, MKD harus segera bertindak dan memberi sanksi jika sudah menerima laporan nama-nama anggota legislatif melakukan judi daring.

Sebab menurut dia, jika prosesnya lamban maka bakal berdampak kepada anggota legislatif yang tidak terlibat judi daring, tetapi citra mereka tercemar akibat ulah sejawatnya.

"Yang paling penting itu juga dalam rangka menjaga marwah DPR RI," ucap Hidayat.

Hidayat juga mengimbau semua lembaga negara aktif memastikan di lingkungan mereka terbebas dari praktik judi daring.

"Bila DPR RI membersihkan lembaga negaranya dari judi online, mestinya semua lembaga negara di rumpun eksekutif maupun yudikatif juga melakukannya secara serentak, berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari kondisi darurat judi online," ujar Hidayat.

Hidayat berharap MKD pro aktif dan profesional mengusut persoalan ini.

Sebab menurut Hidayat, hal itu adalah amanat pembentukan MKD dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan terdeteksi terdapat 1000 anggota legislatif diduga bermain judi daring.

Dari keseluruhan itu dilaporkan terdapat sekitar 80 Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Jenderal melakukan judi daring.

## Kenapa Satgas Baru Dibentuk?

Wacana pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online sebenarnya sudah mencuat sejak April 2024. Kenapa baru dibentuk saat ini?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie



Personel Polsek Dewantara Lhokseumawe, Aceh Sosialisasi Stop Narkoba dan Judi Online. Foto: Dok Humas Polres

baru-baru ini dengan tegas menyuarakan perlawanan terhadap maraknya praktik taruhan online di Indonesia.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai krisis taruhan online yang memerlukan perhatian serius.

Menyikapi hal ini, Budi Arie mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan mengajak selebritas agar tidak mempromosikan taruhan online.

Setelah melakukan pemblokiran terhadap ribuan rekening dan situs judi online Satgas Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga melancarkan tindakan penegakan hukum terhadap para bandar dan jaringan mereka. Yang terbaru, Satgas mengumumkan telah menangkap 18 tersangka terkait kegiatan judi online serta 5 selebgram yang sering mempromosikan judi online.

Jokowi telah menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas Judi Online ini dicatat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024.

Dalam dokumen salinan Keppres tersebut dijelaskan bahwa Satgas dibentuk karena aktivitas perjudian online dianggap ilegal dan menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan masalah psikologis yang dapat memicu tindakan kriminal. Selain itu, keberadaan perjudian online juga dinilai dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah-langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantasnya.

Satgas Pemberantasan Judi Online mengadakan rapat koordinasi untuk

memperkuat strategi dalam memberantas judi online. Rapat kali ini diadakan di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta, dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.

Pemerintah mengajak berbagai komponen masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan. Untuk memberantas judi online, ada dua pendekatan yang akan dilakukan. Pertama, penegakan hukum dan pencegahan yang akan dikendalikan langsung oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Pendekatan kedua melibatkan pendidikan dan rehabilitasi di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Muhadjir mengingatkan masyarakat, khususnya di desa, untuk tidak meminjamkan rekening kepada orang lain. "Jika ada orang yang ingin meminjam nomor rekening dengan imbalan, hendaknya ditolak. Nama dan nomor rekening tersebut dapat digunakan untuk aktivitas judi online oleh peminjam atau bahkan dijual kepada pihak lain," kata Muhadjir.

Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Satgas akan melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam upaya pencegahan, dengan fokus pada pendidikan tentang risiko kecanduan. Tokoh agama juga akan terlibat dalam memperkuat nilai-nilai agama. "Nilai-nilai ini akan disosialisasikan kepada masyarakat," tambah Hadi.

Hadi juga mengungkapkan bahwa upaya bersama diperlukan untuk membasmi judi online, mengingat hampir semua provinsi terdampak oleh aktivitas tersebut. Jumlah pemain dan nilai transaksi yang terdeteksi di setiap wilayah juga sangat signifikan.

"Judi online sudah merambah ke tingkat desa dan kelurahan, dengan modus seperti jual beli rekening dan pengisian ulang saldo," kata Hadi. (wid,rls,ist/dya)

## 4 NEGARA PENGENDALI BANDAR JUDI ONLINE DI INDONESIA

### Cina

Melansir Business Insider, perjudian adalah tindakan ilegal di sebagian besar wilayah Cina, kecuali lotre nasional milik negara.

### Myanmar

Operator kasino online ilegal di Myanmar disebut telah mendiversifikasi lini bisnisnya hingga mencakup penipuan dunia maya dan pencucian mata uang kripto yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata.

### Laos

Berdasarkan laporan Jaringan Akademik Prancis untuk Studi Asia (GIS Asie), perkembangan kasino di Laos telah menjadi simbol transisi neoliberalisme. Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan asing, terutama dari Cina, Thailand, dan Vietnam yang melarang keras praktik perjudian di negaranya.

### Kamboja

Kasino di Kamboja telah menjamur di kota-kota perbatasan sejak 1993, seperti Koh Kong, Pailin, Poipet, Chong Jom, Ha Tien, dan Sihanoukville. Pada 2014, industri perjudian menghasilkan pendapatan pajak sebesar US\$ 25 juta, meningkat sebesar 15 persen per tahun.



# Catat! Tak Ada Tambahan Waktu Pemadanan NIK-NPWP



(Ilustrasi) Petugas melayani wajib pajak. ANTARA

**JAKARTA**-Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada perpanjangan waktu untuk memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya, hari ini adalah batas akhir melakukan pemadanan.

"Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan perpanjangan waktu untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti

Minggu (30/6/2023)

Dwi mengatakan wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP akan terkendala dalam mengakses layanan perpajakan. Termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP.

Dwi mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan hari ini. Pasalnya, seluruh layanan pajak akan menggunakan NIK sebagai NPWP."Kami mengimbau wajib pajak

untuk melakukan pemadanan, dikarenakan terdapat data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi mandiri," ungkap Dwi.

Pemadanan NIK menjadi NPWP hanya berlaku untuk masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Sementara bagi masyarakat yang baru ingin mendaftar, akan langsung menggunakan NIK.

Wajib pajak dapat melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri melalui laman pajak.go.id.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga 19 Juni 2024 masih ada 681 ribu NIK yang belum dipadankan dengan NPWP. Sementara, 4,32 juta data telah dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak, sementara sisanya dipadankan melalui sistem.

Pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Sanksi tersebut termasuk kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan dan layanan administrasi dari pihak lain yang memerlukan NPWP, karena semua layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai

pengganti NPWP. Pemadanan NIK menjadi NPWP ini hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Sementara bagi yang baru ingin mendaftar, akan langsung menggunakan NIK. (wie,rls/dya)

## LANGKAH PEMADANAN NPWP-NIK

1. Buka situs pajak.go.id. Klik menu Login di pojok kanan atas
2. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukkan kode keamanan
3. Buka menu Profil, masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik menu Ubah Profil
4. Tekan tombol Log Out, kemudian coba kembali Login menggunakan NIK dengan kata sandi yang sama dengan sebelumnya

# Pemicu Matahari Tutup Gerai, Asosiasi Ritel Lain Bisa Menyusul

**JAKARTA** - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) buka-bukaan pemicu kabar penutupan gerai Matahari Department Store di Tangerang. Setidaknya ada dua hal utama, yaitu pergantian manajemen perusahaan dan perubahan tren bisnis ritel.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan Matahari baru saja melakukan perubahan manajemen, dengan begitu artinya ada rencana kerja baru perusahaan. Hal ini yang memungkinkan adanya penutupan beberapa toko.

"Menurut kami ada dua hal selaku asosiasi ritel memandang hal ini pertama satu itu ada perubahan-perubahan rencana kerja lah dari manajemen baru," beber Budiharjo Minggu (30/6/2024).

Faktor kedua adalah tren bisnis ritel memang berubah. Format toko besar macam Matahari kini mulai dikurangi, toko-toko meminimalisir bentuknya menjadi lebih sederhana. Budihardjo menduga Matahari memang sedang melakukan transformasi ke arah sana.

"Kedua, memang format big dept

store seluruh dunia memang lagi berubah. Matahari pasti lagi melakukan transformasi. Namanya big dept store di dunia sedang menjadi lebih kecil," beber Budiharjo.

"Penutupan itu yang kami dapat adalah memang strategi perkuat costing perusahaan jadi lebih ringkas dan buka konsep baru," lanjutnya.

Budihardjo bilang bukan cuma Matahari, beberapa waktu ke depan ritel lainnya kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama, memperkecil gerai-gerainya. Gerai besar yang tak terlalu ramai bisa jadi ditutup dan mulai ditransformasi jadi lebih sederhana.

"Nggak cuma Matahari juga, semua saat ini yang kurang rame akan dikecilkan formatnya. Misalnya hipermarket turun jadi supermarket, supermarket jadi minimarket. Ini ikuti customer punya kebiasaan beda sejak COVID-19. Mereka maunya datang yang kecil simpel langsung jalan," jelas Budihardjo.

Sebelumnya, dikabarkan ada dua gerai Matahari yang ditutup di Tangerang, Banten. Informasi soal penutupan gerai Matahari ini juga

beredar di media sosial. Salah satunya dari akun Instagram @abouttng.

Dua gerai Matahari yang disebut mau tutup yaitu di WTC Serpong dan Mal Balekota Tangerang. Akun itu juga menyebutkan ada diskon besar-besaran di Matahari. Disebut penutupan toko dilakukan pada tanggal 30 Juni 2024 atau tepatnya hari ini.

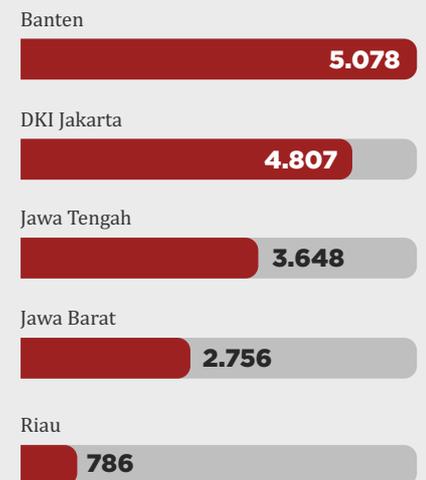
Budihardjo pun mengkonfirmasi kabar tersebut, dia membenarkan beberapa gerai Matahari ada yang mau tutup di Tangerang. Dia menjelaskan gerai yang tutup saat ini juga melakukan pesta diskon sebagai langkah cuci gudang untuk stok dagangan yang tersisa.

"Betul, memang dia tutup dan adakan diskon. Memang namanya tutup toko itu kan stock clearance itu biasa ya," beber Budiharjo.

Tak hanya ritel, sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengakui turunnya permintaan dan ketatnya persaingan produk impor yang lebih murah mengakibatkan banyak pabrik TPT di Indonesia terpaksa melakukan PHK massal.

Sentra-sentra industri yang paling terdampak, kata Jemmy, berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. (wid,tro,ist/dya)

## 5 PROVINSI DENGAN JUMLAH KARYAWAN YANG TERKENA PHK DI INDONESIA (JAN-APR 2024)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

# KPU: Cagub Minimal 30 Tahun pada 1 Januari 2025, Cabup/Cawalkot 25 Tahun

**JAKARTA**-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. MA dalam putusannya memutuskan seseorang bisa maju jadi calon kepala daerah untuk level provinsi tidak harus berusia 30 tahun pada saat pendaftaran.

Tetapi, calon tersebut harus berusia 30 tahun saat pelantikan sebagai kepala daerah terpilih.

KPU dalam menyusun PKPU pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024, sudah mematuhi norma putusan MA.

Meski begitu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, analisis berdasarkan kerangka hukum putusan MA, muncul pertanyaan terkait kapan pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2024.

Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum pemenuhan syarat usia pada masa pendaftaran pasangan calon.

Hasilnya, dalam kerangka hukum putusan MA, diketahui merujuk pada Pilkada terakhir yakni Pilkada 2020.

"Akhir masa jabatan (AMJ) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada terakhir (Pilkada 2020), yaitu "...hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024", harus dimaknai AMJ akhir tahun 2024, yaitu tanggal 31 Desember 2024," ucap Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2024).

"Sebagai konsekuensi hukum dari angka 1 dan 2 tersebut, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada tanggal 1 Januari 2025," tambah dia.

Sementara mengenai Jadwal dan tata cara pelantikan serentak, hal ini menurut KPU, bisa diatur dengan Peraturan Presiden.

"Berdasarkan kerangka hukum dan analisis tersebut disimpulkan bahwa keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025," jelas Hasyim.

"Jadwal dan tata cara pelantikan serentak diatur dengan Peraturan Presiden," tutur dia.

## Isu Pencalonan Kaesang Menguat

Diketahui, Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep langsung jadi sorotan ketika putusan Mahkamah Agung membuat peluang dirinya maju di Pilkada makin lebar. MA merevisi batas syarat usia calon kepala daerah. Sejak saat itu, Kaesang kerap disandingkan dengan sejumlah tokoh yang sudah lebih dulu beredar di orbit Pilkada.



Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. (Dok)

Sebut saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga Budi Djiwandono. Anies-Kaesang sempat dilontarkan PKB Jakarta saat memberi rekomendasi kepada Anies untuk maju Pilgub Jakarta.

Dengan Ridwan Kamil, Kaesang dianggap bisa jadi alternatif wagub pemersatu Koalisi Indonesia Maju. Sebab, saat ini Gerindra dan Golkar punya pandangan beda soal Ridwan Kamil akan maju di Pilgub Jakarta atau Jabar.

Sementara, dengan Budi Djiwandono, Ketua Harian DPP Gerindra Sumfi Dasco Ahmad, mengunggah pasangan Budi-Kaesang di akun pribadinya. Meski belakangan Budi menegaskan tak maju Pilkada karena diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk fokus di DPR.

Lalu muncul, kabar Presiden Jokowi sempat menyodorkan Kaesang ke sejumlah tokoh untuk bisa disandingkan di Pilgub Jakarta. Kaesang pun bereaksi.

"Ya, emang saya perlu izin? Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Beda, dong," kata Kaesang di DPP PSI, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Namun, Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyebut, Presiden Jokowi sudah menyodorkan Kaesang ke sejumlah partai.

Saat ditanya apakah Jokowi juga

menyodorkan Kaesang ke PKS? Aboe tidak menjawab dengan tegas. "Ke mana-mana," tuturnya.

Hal ini menyulut reaksi keras dari Kaesang. Putra bungsu Jokowi itu bahkan menyebut pernyataan itu sebagai kebohongan. "Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawarkan Pak Jokowi," kata Kaesang dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).

"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," tambah Kaesang. Partai di KIM lalu ramai-ramai membela Kaesang. Mereka menyebut, Jokowi tidak pernah menyodorkan nama Kaesang. Tapi, sebagai warga negara, Kaesang tentu punya hak yang sama untuk bisa maju di Pilkada 2024.

Ketum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyebut, partai politik yang butuh sosok Kaesang.

"Gimana nyuruh, orang saya tanya saja, Pak Jokowi bilang jangan. Jadi enggak betul yang nyuruh-nyuruh tuh," kata Zulhas kepada wartawan di DPP PAN, Jakarta, Sabtu (29/6).

"Mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaesang, ya itu soal lain," imbuhnya. Analisis Hasyim disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal

• **\*Amar Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 angka 2 mengubah syarat usia bagi calon kepala daerah. Berikut bunyinya:**

Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pencalonan selengkapnya berbunyi: "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih".

• **Sedangkan ketentuan tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 dalam UU Pilkada diatur dalam UU**

Pilkada Pasal 201. Berikut bunyinya:

- Pasal 201 ayat (7): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

• **Sementara ketentuan tentang Pelantikan Serentak dalam UU Pilkada diatur dalam Pasal 164A dan Pasal 165. Berikut bunyinya:**

- Pasal 164A:

1. Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.  
2. Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota periode sebelumnya yang paling akhir.

- Pasal 165:

Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diatur dengan Peraturan Presiden.

kepastian hukum syarat usia pada masa pendaftaran calon kepala daerah. Berdasarkan putusan MA, Hasyim mengatakan mengacu pada jadwal pilkada terakhir, maka akhir masa jabatan kepala daerah adalah 31 Desember 2024.

"Sebagai konsekuensi hukum, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada tanggal 1 Januari 2025," kata Hasyim.

Bisakah Kaesang Maju Pilgub? Sebelumnya, Hakim MA memerintahkan KPU untuk mengubah syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun pada saat pendaftaran menjadi minimal 30 tahun saat pelantikan. MA menganggap ada kerugian bila perhitungan batas usia calon kepala daerah dibatasi saat pendaftaran.

Kerugian yang dimaksud adalah bagi warga negara atau partai politik untuk mengusung calon yang baru mencapai usia 30 tahun ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon. Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap memberi karpet merah bagi putra Jokowi, Kaesang Pangarep, maju di Pilkada 2024. (wid,rls,ist,ant/dya)

# Kabupaten Malang Targetkan 80% Jalan Mantap di 2025

**MALANG** - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang, menargetkan peningkatan kualitas jalan tahun depan. Ditargetkan 80 persen berstatus jalan mantap di tahun 2025. Rinciannya, total panjang 1.668,7 kilometer. Hingga saat ini, capaian tersebut telah selesai 74 persen.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, yang akrab disapa Oong, mengungkapkan upaya peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas, mengingat pentingnya konektivitas bagi perekonomian daerah.

"Panjang jalan kabupaten ini hampir setara dengan bolak-balik dari Anyer ke Panarukan," ujar Oong pada Minggu (30/6/2024).

Jalan mantap di Kabupaten Malang, menurutnya dikategorikan sebagai jalan yang mengalami kerusakan ringan dan telah diperbaiki. Oong menjelaskan, perbaikan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

"Misalnya ada lubang di jalan, kita tambal, dan itu masuk dalam kategori jalan mantap," ungkapnya.

Saat ini, Oong menyebutkan Dinas

PU Bina Marga Kabupaten Malang tengah memfokuskan upaya perbaikan di seluruh jalan yang berada di 33 kecamatan Kabupaten Malang. Dengan target awal diproyeksikan sebesar 75 persen di tahun ini, Oong optimis dapat meningkatkan kualitas jalan hingga mencapai 80 persen pada tahun depan.

"Masih ada sekitar 300 kilometer lagi yang belum masuk kategori mantap," terangnya.

Terkait alokasi anggaran, Oong menyampaikan, pihaknya menerapkan konsep yang efektif, efisien, dan responsif. Dengan anggaran yang terbatas sebesar Rp 360 miliar untuk tahun 2024, perencanaan yang matang menurutnya menjadi kunci keberhasilan program ini.

Lebih lanjut, Oong menjelaskan bahwa peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang Dinas PU Bina Marga. Namun, ia menekankan hal ini akan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani anggaran.

"Setelah jalan mantap mencapai 80 persen, kita akan naikan status



Pengerjaan perbaikan jalan oleh Dinas PU Binar Marga Kabupaten Malang. (Dok. PU Bina Marga Kab. Malang)

jalan desa menjadi jalan kabupaten," jelasnya.

Dalam kesempatannya ini, Oong juga menegaskan konsep pengelolaan jalan yang diterapkan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik. Tetapi juga pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, jalan yang baik dan terawat akan memberikan dampak

positif pada berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Dengan infrastruktur yang memadai, distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih lancar.

Selain itu, Oong juga meng-harapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan merawat infrastruktur jalan yang telah diperbaiki. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini. (Santi/Dya)

## Legal Opinion IPA Sungai Bango Terbit, Pembangunan Masuk Tahap Baru



Proyek Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Sungai Bango, Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

**MALANG** - Proyek Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Sungai Bango, Kecamatan Blimbing, kini akan memasuki tahap baru. Langkah ini usai Pemerintah Kota Malang resmi menerima legal opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri terkait perizinan proyek tersebut.

Legal opinion ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proses perizinan, terutama Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penyelesaian pembangunan IPA sungai Bango.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota

Malang, Erik Setyo Santoso, mengungkapkan dengan adanya legal opinion tersebut, Pemkot Malang kini tengah merumuskan langkah-langkah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh persyaratan hukum yang diperlukan.

"Kami sudah menerima legal opinion dari kejaksaan negeri kaitannya dengan perizinan IPA atau Water Treatment Plant (WTP) itu. Tentunya setelah menerima LO itu, saat ini kami sedang melakukan rumusan untuk menindaklanjutinya," ujar Erik, saat dikonfirmasi pada Minggu (30/6/2024).

Erik menjelaskan, proyek IPA Sungai Bango ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Malang dan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (PJT) I, yang dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kepala daerah dan PJT I pada tahun 2023 lalu.

Selanjutnya, kerja sama ini dilanjutkan dengan kontrak antara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan Direktur Utama

PJT I.

"Sehingga apapun keputusan terkait legal opinion atau lain-lain, akan menjadi rumusan bahasan yang dituangkan di dalam perjanjian. Karena hukum tertinggi itu kan perjanjian yang ditandatangani," tambah Erik.

Lebih lanjut, Erik menyebutkan jika perjanjian telah ditandatangani, seluruh ketentuan termasuk proses perizinan, harus diikuti. Dalam hal ini, Erik optimistis bahwa pembangunan IPA Sungai Bango dapat segera dilanjutkan setelah perizinan AMDAL selesai.

"Kalau izinnya beres, pembangunan bisa segera kembali dilakukan. Sebenarnya proses perizinan ini kan tahapan yang standar saja. Berlaku untuk semuanya yang akan melakukan pembangunan, apalagi ini skala besar," jelasnya.

Dengan adanya perkembangan ini, Erik mengharapkan pembangunan IPA Sungai Bango dapat segera dilanjutkan dan mampu meningkatkan kualitas air minum bagi masyarakat Kota Malang.

Pasalnya diketahui, proyek penyediaan air bersih yang bersumber dari air permukaan salah satu sungai di Kota Malang ini, ditargetkan mampu mengatasi kebutuhan air baku sebesar 500 liter per sekon (lps).

Di mana pada akhir 2023 hingga 2024 ini, ditargetkan mampu

menyediakan 200 lps dengan tambahan 100 lps pada tahun 2025 dan total 500 lps pada tahun 2027. (Santi/Dya)



Kami sudah menerima legal opinion dari kejaksaan negeri kaitannya dengan perizinan IPA atau Water Treatment Plant (WTP) itu. Tentunya setelah menerima LO itu, saat ini kami sedang melakukan rumusan untuk

**ERIK SETYO SANTOSO**  
Sekda Kota Malang,



# SUTRADARA INDONESIA TIMO TJAHJANTO AKAN GARAP SEKUEL FILM NOBODY



**TIMOTHY** Tjahjanto, atau yang lebih dikenal Timo Tjahjanto, semakin mengukuhkan namanya di kancah perfilman internasional. Baru-baru ini, Timo diumumkan sebagai sutradara untuk film Nobody 2, sekuel dari film Nobody (2021) yang diproduksi oleh 87 Eleven Entertainment, rumah produksi yang juga menggarap film-film populer seperti John Wick, Atomic Blonde, dan Violent Night.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Timo melalui akun Instagram pribadinya, @timobros. Dalam unggahan tersebut, Timo menyatakan kegembiraannya. "Merasa terhormat dan menanti untuk bekerja sama dengan jajaran pemain dan

tim yang luar biasa," tulis dia, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

## Timo Tjahjanto Gantikan Ilya Naishuller di Nobody 2

Film pertama Nobody disutradarai oleh Ilya Naishuller dan dirilis pada 2021, dengan Bob Odenkirk berperan sebagai Hutch Mansell. Kini, Timo akan menggantikan posisi Ilya sebagai sutradara untuk film kedua ini dan bekerja sama dengan Bob Odenkirk yang akan kembali memerankan karakter Hutch Mansell. Selain itu, Connie Nielsen juga akan kembali berperan sebagai Becca Mansell, istri Hutch.

Produksi Nobody 2 dijadwalkan akan dimulai pada Agustus 2024. Target tayang perdana yaitu pada 15 Agustus 2025, di bawah naungan Universal Pictures. Film ini akan menjadi proyek pertama yang mempertemukan Timo dengan Bob Odenkirk, yang terkenal lewat serial Better Call Saul. Hingga saat ini, detail tentang pemeran pendukung lainnya masih dirahasiakan.

## Sinopsis Film Nobody

Film Nobody menceritakan kisah Hutch Mansell, seorang mantan agen rahasia pemerintah yang kini menjalani kehidupan biasa. Namun, hidupnya berubah ketika ia menjadi target mafia narkoba setelah menolong seorang yang sedang dilecehkan. Mansell kemudian harus berjuang menghadapi kawanan anak buah bos narkoba.

Dirilis pada 2021, film Nobody meraih sukses besar dengan pendapatan box office sebesar USD 57,5 juta (sekitar Rp 942 miliar). Angka ini jauh melampaui biaya produksi sebesar USD 16 juta (sekitar Rp 262 miliar).

Dalam menggarap Nobody 2, Timo akan bekerja sama dengan Derek Kolstad, penulis naskah yang juga menulis untuk film pertama Nobody dan beberapa film dalam seri John Wick. Derek akan menulis skenario untuk sekuel thriller aksi ini bersama Aaron Rabin, Umair Aleem, dan Bob Odenkirk. Di kursi produser, terdapat nama-nama seperti David Leitch, Kevin McCormick, Marc Provisiero, dan Braden Aftergood.

## Rekam Jejak Karier Timo Tjahjanto

Timo Tjahjanto sendiri adalah sutradara yang dikenal dengan karya-karya bergenre horor dan aksi laga. Bersama Kimo Stamboel, dia membentuk duo 'The Mo Brothers' yang sukses dengan film-film seperti Rumah Dara (2010), Killers (2014), dan Headshot (2016). Timo juga dikenal lewat film-film horor seperti Sebelum Iblis Menjemput (2018), The Night Comes for Us (2018), Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 (2020), juga The Big 4 (2022).

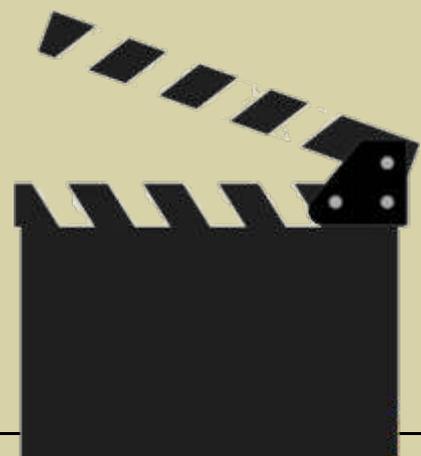
Selain Nobody 2, Timo sedang disibukkan dengan berbagai proyek besar lainnya. Melansir dari laman IMDB, Timo sedang menggarap beberapa film termasuk remake Hollywood dari Train to Busan yang berjudul The Last Train to New York, The Shadow Strays, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 3: Dajjal, dan Si Buta dari Gua Hantu. Dengan semakin banyaknya proyek internasional yang digarapnya, Timo Tjahjanto terus membuktikan posisinya sebagai salah satu sutradara berbakat dari Indonesia yang diakui di kancah perfilman dunia. (nei,ist/dya)

“

Merasa terhormat dan menanti untuk bekerja sama dengan jajaran pemain dan tim yang luar biasa,”

....

**TIMOTHY  
TJAHJANTO**



# TERNYATA GIGI BERLUBANG BISA TINGKATKAN RISIKO PENYAKIT JANTUNG, INI SEBABNYA

**SERAI** atau sereh, tanaman herbal yang Gigi berlubang dapat menyebabkan berbagai masalah dalam keseharian, seperti sulit mengunyah makanan hingga memunculkan rasa nyeri yang terus menerus. Tak banyak yang tahu, rupanya kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kok bisa?

Spesialis jantung dan pembuluh darah dr Basuni Radi, SpJP, menjelaskan kondisi tersebut mungkin saja terjadi akibat infeksi yang terjadi dari gigi berlubang.

"Nah, itu karena infeksi di jantungnya, itu kan gigi berlubang tadi

kan ada nanah atau infeksi di situ, lalu dia masuk di situ aliran darah infeksi kumannya, itu bisa nyebar kemana-mana bahkan bisa ke katup jantung di dalam," kata dr Basuni ketika ditemui awak media di Jakarta Barat, Selasa (25/6/2024).

Ketika masuk ke dalam aliran darah, kuman-kuman tersebut bisa 'bersarang' di jantung dan menyebabkan kerusakan jantung. Kerusakan tersebut dapat terjadi pada katup dan otot jantung. Gangguan sistemik seperti demam juga bisa muncul ketika kondisi tersebut terjadi.

Tidak hanya pada gigi berlubang, kondisi tersebut juga bisa berawal dari infeksi kuman-kuman pada luka terbuka pada kulit.

"Kalau infeksi di dalam otot jantung atau katup jantung itu namanya infective endocarditis. Itu sebenarnya juga nggak dari gigi saja, bisa dari luka juga manapun bisa, asal yang penting adanya kuman yang masuk ke dalam aliran darah," jelas dr Basuni.

"Nempel lah mereka nanti di tempat tertentu, nggak cuma di lukanya, tapi juga ke otot jantung, bagian dalam jantung, lengket di situ," sambungnya.

Oleh karena itu, dr Basuni meminta masyarakat untuk terus menjaga kebersihan gigi. Hal ini untuk mencegah gigi berlubang dan menjaga kebersihan mulut ketika gigi sudah terlanjur berlubang. Apabila mengalami gigi berlubang, dr Basuni juga mengimbau masyarakat untuk segera menanganinya ke dokter gigi.

Kebersihan mulut yang tidak terjaga dengan baik dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah masalah jantung walaupun memang tidak secara langsung.

"Giginya harus dibersihkan secara rutin, karena misalnya ada pembuluh darahnya terbuka di situ ya itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah masuk ke dalam tubuh kita tergantung dia nyangkutnya di mana," tandasnya. (Berbagai Sumber)



“

**Nah, itu karena infeksi di jantungnya, itu kan gigi berlubang tadi kan ada nanah atau infeksi di situ, lalu dia masuk di situ aliran darah infeksi kumannya, itu bisa nyebar kemana-mana bahkan bisa ke katup jantung di dalam,"**

■ ■ ■

**dr Basuni Radi**



# NISSAN DI GIIAS 2024 : RILIS SERENA BARU - BAWA 2 MOBIL LISTRIK

**NISSAN** membocorkan akan meluncurkan mobil baru di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Produsen mobil asal Jepang ini akan meluncurkan Nissan Serena terbaru.

"Pada pameran GIIAS tahun ini kami menghadirkan dan meluncurkan produk elektrifikasi Nissan yang kami harapkan bisa menjadi garda terdepan. Pada event GIIAS ini kami akan meluncurkan secara resmi All New Serena e-Power setelah meluncur perdana tahun lalu. Kami yakin Serena e-Power Akan dapat bersaing di segmen MPV pilihan keluarga," kata Caca Tobing, Nasional Sales Division Head PT Nissan Motor Distributor Indonesia di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Serena e-Power terbaru ini sebelumnya telah dipamerkan di GIIAS tahun lalu. Namun, Nissan baru menjualnya di tahun ini setelah mendapat animo yang positif dari calon konsumen.

"Kami yakin kehadiran Serena semakin melengkapi pilihan e-Power di Indonesia menyusul kesuksesan Nissan Kicks e-Power," kata Caca.

Serena e-Power terbaru ini menggunakan teknologi e-Power generasi kedua. Nissan Serena e-Power teranyar ini diklaim memiliki kabin lebih luas. Nissan Serena e-Power meluncur di

Jepang pada November 2022. Mobil ini mengusung teknologi e-Power, terdapat sumber daya AC 100V (1.500 W) yang dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik saat berada di luar ruangan atau sebagai sumber listrik dalam keadaan darurat. Mobil ini dibekali mesin 1.400 cc yang sepenuhnya baru dan dikembangkan secara khusus. Mobil mengusung sistem penggerak roda 2WD. Di Jepang,

Selain Serena terbaru, Nissan juga akan menampilkan dua mobil listrik murni. Kedua mobil listrik yang akan dipamerkan antara lain Nissan Sakura dan Nissan

Ariya.

"Ariya adalah crossover SUV full listrik. Dan Sakura adalah kendaraan listrik populer di Jepang," ujar Caca.

Tak cuma itu, Nissan pun akan memamerkan konsep mobil masa depan di GIIAS 2024 nanti. Kemungkinan konsep yang akan dipamerkan di GIIAS 2024 adalah Nissan Hyper Tourer.

Nissan Hyper Tourer memadukan esensi omotenashi (keramahan Jepang) dengan berbagai teknologi canggih, termasuk mengemudi otonom. Mobil ini memiliki fungsionalitas V2X (Vehicle-to-Everything) dan baterai berkapasitas tinggi yang memungkinkan listrik disuplai ke rumah, toko, dan kantor. Saat bepergian. (nei,ist/dya)



**SERENA  
E-POWER**



# KULON PROGO PIKAT MINAT WISATAWAN DENGAN RAGAM AKTIVITAS DESA WISATA



**DAERAH** Istimewa Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan kawasan Malioboro atau Keraton Yogyakarta saja. Sedikit bergeser ke wilayah Barat Daya DIY, ada sebuah kabupaten yang meningkatkan daya tarik wisatanya dengan memperkenalkan ragam aktivitas desa wisata yaitu Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Joko Mursito menyebut, Kulon Progo sedang meningkatkan setiap desa wisatanya menjadi lebih premium untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan mengembangkan beberapa elemen desa wisata seperti homestay, kegiatan live in atau aktivitas hidup berbaur dengan masyarakat setempat, menjadi konsep yang sedang ditingkatkan di Kulon Progo.

"Kulon Progo itu sudah menetapkan pembangunan pariwisatanya berbasis pemberdayaan masyarakat, buktinya Kulon Progo 4 tahun berturut-turut masuk ADWI

(Anugerah Desa Wisata Indonesia) itu hanya di Kulon Progo dari se-Indonesia, itu bukti bahwa penggunaan kami di desa-desa wisata berhasil," kata Joko saat ditemui media di Bendung Kamijoro, Kulon Progo, pada Sabtu (22/6).

Salah satu yang juga membuat Kulon Progo meningkatkan standar wisatanya adalah karena hadirnya bandara Yogyakarta International Airport, seperti pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dan bekerja sama dengan pengembang hotel untuk membangun properti di wilayah tersebut.

Hotel bertaraf internasional juga membuat homestay yang dikelola warga setempat menjadi harus lebih menaikkan standar dari segi pelayanan dan produk yang dipakai menjadi lebih premium.

Pelatihan dan pendampingan pun terus dilakukan baik dari Dinas Pariwisata dan Kelurahan setempat bekerja sama dengan hotel sekitarnya agar mematangkan bagaimana

menjamu pengunjung dengan pelayanan terbaik ala hotel.

"Pelatihan sudah berjalan dari 2021 sampai 2024 sudah menjalankan program yang namanya Lomba Gelar Potensi Desa Wisata Menebar Pesona, salah satu yang dinilai dalam desa wisata itu adalah homestay jadi juri datang mereka menginap, saya bikin standar sendiri karena kami harus tahu bagaimana dia melayani selama 24 jam," kata Joko.

Paket wisata yang ditawarkan ke pelancong juga berupa eksplorasi kekhasan setiap desa yang ada di Kulon Progo, seperti wisata alam atau adventure, wellness tourism, dan tema budaya seperti konservasi dengan total 26 desa wisata.

Joko menerapkan aturan bahwa setiap desa wisata harus menetapkan tema masing-masing agar penyebaran pelancong bisa merata dan memiliki banyak pilihan aktivitas wisata.

Seperti salah satunya aktivitas wisata konservasi burung di Jatimulyo yang ternyata memikat para turis

asing, sehingga mereka menginap di homestay warga setempat untuk melakukan bird watching. Ada pula wisata edukasi Rumah Sandi di Tinalah, wisata alam Ngargosari atau Widosari dengan pemandangan gunung api purba, dan ada pula aktivitas outbound di Argo Tirto.

"Yang sudah dapat ADWI ada 4 di Tinalah wisata edukasi, Ngargosari atau Widosari itu alam gunung api purba, Hargotirto homestay outbound activity, tahun ini Jatimulyo dengan konservasi," katanya.

Ke depannya Joko ingin Kulon Progo menyukseskan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada isu lingkungan seperti adanya pengelolaan sampah, dan pengumpulan sampah plastik dari masyarakat jika ada kegiatan budaya. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan Kulon Progo dan bisa menarik wisatawan mulai dari domestik hingga mancanegara. (nei,ist/dya)

**'Kartu Merahkan ... (dari Hal 1)**

**KEMENTERIAN** Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan, 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak

Salah satu layanan yang terdampak adalah laman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran KIP Kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi sudah dibuka sejak Jumat (7/6/2024). Pada Minggu (30/6/2024) saat ditelusuri KIP-Kuliah yang diakses melalui <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>, belum bisa diakses.

Kemendikbudristek mengakui masalah Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2) berdampak pada sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Sekretaris Jenderal, Suharti, mengatakan serangan ransomware itu membuat sistem KIP Kuliah belum bisa diakses karena sedang dalam pemulihan.

Pemulihan sistem menggunakan cadangan data penerima dan pendaftar KIP Kuliah pada pusat data Kemendikbudristek diklaim. Suharti berjanji sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi paling lambat 29 Juli 2024.

Tak Bisa Kuliah Tanpa Bantuan, Anak Kuli Bangunan Harap Sistem KIP Kuliah Segera Normal "Proses pemindahan, pemulihan, dan rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain di pemerintah membutuhkan waktu. Sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada tanggal 29 Juli 2024," kata Suharti dalam Surat Pemberitahuan Masalah PDN yang terbit pada 28 Juni 2024 dikutip Minggu, (30/6/2024).

Surat itu bisa diakses di laman resmi Kemendikbudristek dan dibenarkan Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto.

Suharti mengatakan, serangan ransomware membuat Kemendikbudristek tidak bisa memulihkan sistem dan data KIP Kuliah pada PDNS2. Kemendikbudristek juga tidak memiliki cadangan data terhadap sistem dan data KIP Kuliah. Karena itu, Kemendikbudristek saat ini sedang melakukan pemulihan sistem KIP Kuliah.

Saat ini sudah 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024. Selama masa pemulihan, pendaftar KIP harus menunggu atau upload ulang dokumen serta reclaim akun mulai 19 Juli hingga 30 Agustus 2024.

Bagi yang belum pernah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024, pendaftaran KIP Kuliah 2024 akan dibuka kembali mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.

KIP Kuliah juga berdampak kepada data 16.316 mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing. Selama proses pemulihan, pengajuan dan pencairan untuk mahasiswa penerima

KIP Kuliah ongoing dilakukan secara manual. Bagi kampus pengelola KIP Kuliah, diminta melakukan identifikasi dan verifikasi pada mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing yang belum menerima KIP Kuliah pada semester genap 2023/2034.

"Pengelola juga harus berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek untuk proses pencairan," kata Suharti.

Suharti memastikan, semua proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing semester genap 2023/2024 akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada bulan Agustus 2024

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Hasbi, mengatakan, sebanyak 47 layanan Kemendikbudristek terkendala imbas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS diretas hacker. Salah satunya sistem KIP Kuliah.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Semuel Abrijani Pangarepan juga membenarkan website milik Kemendikbudristek terkena peretasan. "Kena ya kena," kata Semuel ditemui usai konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Senin, 24 Juni 2024.

Website Kemendikbudristek menjadi salah satu dari daftar 210 intansi yang mengalami peretasan, selain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyayangkan hilangnya 800 ribu data calon mahasiswa pendaftar KIP tersebut.

"Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack," kata Dede, dalam keterangan persnya.

Ia juga menyesali tidak adanya backup data oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Padahal data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia. Sehingga, melakukan backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi.

"Saya sangat menyesal, kenapa? Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Dengan demikian, ia berharap peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah untuk perbaikan ke depannya, sebelum pemerintah menjadikan Indonesia sebagai hub-regional big data di Asia dan Pasifik.

"Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data, maka rasanya belum siap juga kita

untuk melakukan Big Data," tegasnya.

**Potensi Kerugian Rp1 Triliun Sehari**

Terpisah, Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda membeberkan kerugian ekonomi akibat sistem Pusat Data Nasional (PDN) sementara lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, potensi kerugian ekonomi bisa menyentuh angka Rp1 triliun per hari.

"Ada anggaran pelayanan umum sebesar Rp721 triliun di APBN 2023. Klaim pemerintah, penggunaan teknologi digital bisa hemat 50% dari anggaran pelayanan umum. Artinya, ada manfaat yang hilang hampir Rp1 triliun per hari ketika sistem PDN kita lumpuh," ujarnya, Minggu (30/6/2024).

Selain itu, ada penggunaan data server di AWS sebesar US\$15.000 per bulan untuk penggunaan sistem data imigrasi darurat. Dilakukan minimal satu bulan. Ada juga biaya pemulihan data yang diestimasi dari biaya tebusan dari hecker yang mencapai Rp131 miliar.

"Dari data tersebut, ada kerugian ekonomi baik angsung dan tidak langsung sebesar Rp6,3 triliun. Ada surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDN sebesar Rp2,7 triliun. Lumpuhnya PDN menghambat aktivitas ekonomi dan menjadikan lebih lambat," jelasnya.

Nailul mengatakan potensi penerimaan pemerintah yang hilang bisa mencapai Rp17 miliar dari layanan yang lumpuh dan potensi ekonomi yang hilang. Sebagai contoh, pelayanan paspor yang lumpuh menjadikan layanan lebih lambat sehingga pembuatan menjadi lebih lama. Ada potensi kehilangan pengurusan paspor ketika sistem lumpuh.

Maka dari itu, lumpuhnya sistem PDN harus disikapi dengan serius dengan mengaudit keuangan dan kinerja PDN. Membangun PDN mesti dilengkapi sistem perlindungan data yang kuat dengan melibatkan

ahli TI nasional.

"Mendesak pimpinan K/L terkait untuk bertanggung jawab terhadap kerugian ekonomi. Kemudian, alangkah lebih bijak jika pimpinan K/L terkait mundur dari jabatannya karena sudah lalai yang menyebabkan kerugian bagi ekonomi negara dan melanggar UU Perlindungan Data Pribadi," tutupnya.

Sementara itu mengenai data kependudukan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi memastikan masih aman lantaran belum tergabung dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

"Sebagai informasi bahwa data kependudukan yang dikelola melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, pada saat ini tidak atau belum bergabung dengan PDNS," kata Teguh Minggu (30/6/2024).

Menurutnya, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui SIAK Terpusat, berada dalam data center Kemendagri.

Dengan demikian, layanan kependudukan saat ini bisa dipastikan berjalan normal. "Dengan penjelasan tersebut, maka akses pemanfaatan data kependudukan tetap berjalan dengan normal, dan semoga tidak terjadi gangguan," pungkasnya.

Kendati demikian, ia mengaku prihatin atas serangan ransomware yang menasar PDNS beberapa waktu yang lalu.

"Kami pastinya prihatin dengan kejadian tersebut dan ini pastinya juga menjadi pembelajaran serta mengingatkan kita semua yang bertugas dalam pengelolaan data untuk lebih hati-hati dan terus melakukan pembenahan atau perbaikan dalam menjaga keamanan data," ujarnya.

Teguh mengatakan, serangan ransomware terhadap PDNS membuat ratusan sistem dari instansi/ lembaga pemerintah daerah down, sehingga berdampak pada pelayanan publik yang terganggu hingga saat ini. (wid,rls,ist,kcm,ant/dya)



Rp (Per Bulam)

# 10 Hari Pengungsi WNA di Kuningan Resahkan Warga 'Harusnya UNHCR Indonesia Ditutup'

**JAKARTA-** Sudah sekitar 10 hari sejumlah warga negara asing (WNA) dari berbagai negara mendirikan tenda-tenda di sekitaran kantor United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) di Kuningan, Jakarta Selatan. Hal itu mulai menimbulkan keresahan warga.

Ahli hukum internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Hikmahanto Juwana, menyoroti posisi UNHCR di Indonesia.

"Nah ini dia. Ini harusnya UNHCR di Indonesia ditutup karena jadi daya tarik calon pengungsi," ungkap Hikmahanto lewat pesan kepada kumparan, Minggu (29/6/2024).

"Padahal Indonesia bukan peserta dari Konvensi Pengungsi," tambahnya.

Konvensi Pengungsi 1951 merupakan perjanjian multilateral yang menetapkan hak-hak individu untuk mendapatkan suaka sekaligus tanggung jawab negara yang memberikan suaka.

Indonesia bukan bagian dari negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Negara-negara yang menandatangani konvensi, atau disebut negara penerima pengungsi, adalah Australia, Selandia Baru, Inggris, hingga Kanada.

Menurut perjanjian itu, Indonesia tidak memiliki kewajiban menampung para pengungsi dari negara konflik.

Diketahui, Warga negara asing (WNA) dari berbagai negara yang sedang mengalami konflik seperti Somalia, Sudan, Afghanistan, Rohingya, Irak, Iran, dan Yaman, mendirikan tenda-tenda di depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jalan Setia Budi Selatan, Kuningan, Jakarta Selatan membuat resah masyarakat sekitar.

Hingga saat ini, belum ada yang bisa membubarkan para pengungsi tersebut. Sementara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jakarta Selatan juga tidak bisa melakukan tindakan karena pengungsi yang mendirikan tenda di kawasan Kuningan berada di bawah kewenangan UNHCR.

Penasihat bidang hubungan internasional dan kebijakan publik sekaligus pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mendorong relokasi kantor UNHCR jika pihaknya tak kunjung berhasil menertibkan para pengungsi.

"Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak bisa menertibkan pengungsi kembali ke tempat-tempatnya dan menuju tujuan, maka kantor UNHCR harus dipindah ke lokasi terpencil, tidak di perkotaan," tulis Dinna, Minggu (29/6/2024).



Sejumlah tenda yang dipasang pengungsi di sekitar kawasan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR), Jakarta, Sabtu (29/6/2024) ANTARA

Menurutnya, UNCHR harus diberi peringatan dan proses mengurangi tumpukan pengungsi di Indonesia perlu dibicarakan lebih tegas.

"Menurut saya UNHCR harus diultimatum, karena Indonesia bukan negara penandatangan konvensi refugees maka Indonesia tidak bisa dibebani urusan penanganan pengungsi," tuturnya.

Dinna juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan ini. "Ini tanggung jawab pemerintah pusat, bukan pemda. Bukan pula sektoral kementerian," tulis Dinna.

## Pemerintah RI Tak Berwenang

Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jakarta Selatan menegaskan bahwa pengungsi yang membuat tenda di kawasan Kuningan

merupakan kewenangan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR).

"Kalau dari Imigrasi mereka kan bukan pelanggar keimigrasian, karena sudah mengantongi kartu UNHCR itu," kata Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan Bhimsa Sanlito saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Bhimsa menuturkannya jika mereka terbukti melanggar aturan Imigrasi, maka pihak Imigrasi bisa dengan mudah melakukan deportasi.

Namun, lanjut dia, mereka dari awal masuk tidak melalui TPI lantaran sudah terdata oleh pihak UNHCR sebagai warga dari negara konflik yang mayoritas berasal dari Afghanistan dan Irak.

"Jadi rata-rata mengantongi kartu UNHCR dan mereka sedang menunggu keputusan untuk geser ke negara berikutnya yang bakal menampung mereka," ujarnya.

Dalam menunggu keputusan itu bisa membutuhkan waktu lama sehingga mereka memilih untuk tinggal di Indonesia. Salah satunya mendirikan tenda di sekitar kawasan UNHCR.

"Setelah didata nanti UNHCR yang menentukan status mereka, kalau bukan 'refugee' maka akan dikembalikan ke negara asal. Kalau 'refugee' maka mereka menunggu keputusan UNHCR untuk menuju ke negara ketiga," katanya.

Meski Imigrasi bersama Pemerintah Provinsi DKI dan jajaran telah membentuk Tim Penanganan Pengungsi Luar Negeri, namun semua itu kembali lagi dengan keputusan UNHCR.

Karena itu, dia berharap UNHCR bisa segera memperjelas status para pengungsi tersebut sehingga mereka mendapatkan kepastian.

"Saya harap agar para pengungsi ini bisa segera ditetapkan statusnya," ujarnya. Sebelumnya, Juru bicara Kemlu Roy Soemirat mengatakan Kemlu telah mengkomunikasikan permasalahan ini dengan UNHCR.

Ia menegaskan apa yang dilakukan juga sesuai dengan tugas Kemlu dan pembagian tugas di antara berbagai lembaga pemerintah terkait penanganan pengungsi.

"Kemlu juga terus berkoordinasi dengan Kemenkopolkumhukam selaku koordinator dan Ketua Satgas PPLN terkait upaya penanganan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah & pemangku kepentingan terkait," ucapnya. (wid,rls,ist,kum/dya)

